

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tugas dan peran dari bupati yaitu menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Seperti, bupati bertanggung jawab untuk mengatur pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan ekonomi, memenuhi hak-hak masyarakat, dan mengawasi pengelolaan keuangan (Kurniawan, 2017). Selain itu, Bupati juga bertanggung jawab untuk mendorong kerjasama antar daerah dan antar pemerintah di tingkat nasional, menghubungkan pemerintah dengan masyarakat lokal, dan menjaga keselamatan masyarakat. Bupati juga memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh Bupati sangat penting bagi pembangunan daerah. Dengan kegiatan-kegiatan ini, Bupati dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan sumber daya, memperkuat kerjasama antar daerah dan antar pemerintah, dan memenuhi hak-hak masyarakat. Kegiatan Bupati juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Bupati dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih. Kegiatan ini juga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kendala yang dihadapi oleh Bupati dalam menjalankan tugas dan perannya adalah masalah anggaran. Bupati biasanya memiliki anggaran yang terbatas untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan inovasi Bupati dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, Bupati juga sering menghadapi kendala yang berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan yang tidak bisa diterapkan secara lokal, yang dapat menghambat

kinerja Bupati. Kemudian, Bupati juga harus menghadapi kendala yang berasal dari masyarakat lokal. Masyarakat lokal mungkin memiliki pandangan yang berbeda (Ayu, 2022)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bupati dalam mengatasi pandangan masyarakat adalah mengenai komunikasi. Masyarakat lokal mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Bupati. Oleh karena itu, Bupati harus menciptakan suatu forum yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pandangannya secara terbuka dan konstruktif. Selain itu, Bupati juga harus berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pembangunan di daerah. Bupati harus memfasilitasi program-program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Oleh karena itu penting adanya humas dalam pemerintahan, fungsi humas pemerintah sebagai manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan atau sebaliknya. Pentingnya peran Humas di suatu instansi dan lembaga pemerintah, dalam masyarakat modern, yakni dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tempat dan berbagai bidang (*Prokopim Kabupaten Bengkalis, n.d.*). peranan humas dalam pemerintahan mengalami perubahan, Struktur pemerintahan mengalami perubahan besar pada tahun 2020, perubahan ini berdasarkan aturan kementerian dalam negara republik Indonesia (Kemendagri RI) No 56 tahun 2019, mengenai pendoma nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan Kabupaten atau kota. Sehingga bagian humas mengalami pergantian nama, Sebagai penggantinya dibentuklah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau disingkat prokopim. Prokopim memposisikan diri sebagai salah satu penyokong fungsi Sekretariat Daerah. Prokopim tetap berfokus pada penyediaan layanan keprotokolan dan kehumasan (Hairuni, 2020). Setda prokopim terdiri dari 3 sub bagian, yang pertama sub bagian protokol, kedua sub bagian komunikasi pimpinan, kemudian yang ketiga sub bagian dokumentasi dan publikasi untuk kegiatan pimpinan.

Permasalahan komunikasi interpersonal yang dihadapi oleh setda prokopim kab. Klaten dalam menyukseskan kegiatan bupati dalam ruang lingkup internal yaitu kompleksitas komunikasi dalam berkoordinasi antara staf prokopim lainnya. prokopim harus memastikan jika informasi yang disampaikan kepada staff lainnya akurat dan benar. Selain itu prokopim juga harus memastikan bahwa semua staf lain dapat mengakses informasi yang disebarkan secara cepat dan mudah. Prokopim juga harus memastikan juga harus memastikan semua staf dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan prokopim itu sendiri. Untuk menghindari permasalahan tersebut maka penting adanya komunikasi interpersonal dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan bupati.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh setda prokopim di kabupaten Klaten tersebut yang pada akhirnya membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai *pola komunikasi interpersonal dalam menyukseskan kegiatan bupati Klaten*. Selanjutnya untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka pada penelitian ini memfokuskan penelitian pada komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh para staff setda prokopim kabupaten Klaten dalam menyukseskan kegiatan bupati Klaten.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana *pola komunikasi interpersonal dalam menyukseskan kegiatan bupati Klaten (studi kasus bagian setda prokopim kab Klaten)?*

### **1.3. Tujuan Penelittian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: untuk menganalisis *pola komunikasi interpersonal dalam menyukseskan kegiatan bupati Klaten (studi kasus bagian setda prokopim kab Klaten)*

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari hasil penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diambil dari setiap penelitian yang dilakukan, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat akademis.

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa terutama yang berhubungan dengan pola komunikasi interpersonal dalam menyukseskan kegiatan bupati yang dilakukan oleh setda prokopim. Dengan kata lain penelitian ini dapat dikatakan menjadi referensi karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti untuk membentuk pola komunikasi interpersonal dan penalaran yang luas, sekaligus untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan peneliti dengan ilmu yang sudah didapatkan. Selain itu juga untuk menjadi bahan pertimbangan staf setda prokopim dalam melakukan komunikasi interpersonal.

#### **1.5. Sistematika Bab**

Untuk mempermudah gambaran tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sistematik penyusunan kedalam lima bab. Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti pedoman penulisan skripsi yang telah diterbitkan oleh prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Adapun sistematika pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab

**BAB II**      **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II ini terdiri dari landasan teori, penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

**BAB III**     **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada BAB III peneliti akan menampilkan beberapa poin seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, objek penelitian, dan subjek penelitian.

**BAB IV**     **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV ini terdiri dari penjelasan mengenai hasil dari pembahasan. Peneliti akan menguraikan hasil peneliti data dan selanjutnya dianalisis dalam bentuk deskripsi. Adapun hasil temuan data tersebut berkaitan dengan pola komunikasi interpersonal dalam menyukseskan kegiatan bupati Klaten.

**BAB V**      **PENUTUP**

Pada BAB V terdiri dari hasil kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu pada bab ini juga memaparkan beberapa saran.